

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

MILSA DESVA RAHAYU
NIM. 11624203862

**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H / 2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **MILSA DESVA RAHAYU**
 NIM : 11624203862
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah ”**, yang ditulis oleh:

Nama : Milsa Desva Rahayu
 Nim : 11624203862
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Muharam 1442 H
 2 September 2020

Pembimbing Skripsi


Afrizal Ahmad, M.Sy
 NIK. 130 217 085

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas Pegawai Negeri Sipil yaitu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai perilaku dan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangatlah penting guna kelancaran tugas negara. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, pemerintah menetapkan sebuah peraturan tentang disiplin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimana peraturan tersebut berisi sebuah kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak di tinjau dari fiqh siyasah. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan apa yang telah di terapkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama pelaksanaan pada pasal 3 dan 4 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran terhadap jam masuk kerja dan tidak mengikuti apel pagi. Namun, semua pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut sudah di berikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Hasil tinjauan fiqh siyasah di dalam permasalahan ini terkait kaidah siyasah suturiyah yang mana kaidah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Namun setelah dilaksanakan peraturan pemerintah ini adanya ketidaksesuaian dengan kaidah tersebut sehingga para atasan dan pegawai harus menaati dan memahami peraturan ini secara siyasah juga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Ayahanda Muhiir dan Ibunda tercinta Amidah serta abangku Yogi Darmawan Saputra, S.Ikom beserta adik-adikku Fadil Setiawan dan Imelia Natasya yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag ,selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku WakilRektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku WakilRektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku WakilRektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs.H.Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Afrizal Ahmad M.Sy, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Jumni Nelly, M.Ag selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.

7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

8. Terimakasih kepada sahabatterbaikku Nanda Ayu Mahbubah, Rizky Adinda Putri, Lidya De Vega, Rika Susi Susanti dan Ratih Zuliani yang selalu memberi do'a, semangat dan motivasi kepada penulis.

9. Terimakasih kepada sahabat karibku Siti Asia yang senantiasa ada bersama penulis di masa perkuliahan dan memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada Jarwandri Aprianto, SH yang telah banyak membantu mulai dari awal skripsi ini ditulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada Muhammad Aulia Hizbullah dan Aswarudian yang telah memberikan do'a dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.

Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih atas pertemanan yang sangat luar biasa di masa perkuliahan.

Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amiin yaa Robball'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Penulis,

Milsa Desva Rahayu
Nim. 11624203862

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Siak	18
B. Landasan Terbentuknya Kabupaten Siak.....	21
C. Kondisi Geografis Kabupaten Siak.....	21
D. Visi Misi Kabupaten Siak	23
E. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak.....	24
F. Kondisi Agama.....	26
G. Kondisi Pendidikan	28
H. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum.....	29
I. Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum.....	30
J. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian.....	34
1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	34
2. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	38
3. Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	40
4. Objek Penjatuhan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	42
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	44
B. Penegertian Fiqih Siyasah	46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak	48
B. Faktoryang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.....	51
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten Siak Menurut Agama dan Kecamatan Per Desember 2013	26
Tabel II.2	Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Siak Menurut Kecamatan 2013.....	27
Tabel II.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Menurut Pendidikan Tahun 2019	31
Tabel II.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Menurut Golongan Tahun 2019.....	32



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks yang lebih luas, Negara mempunyai tujuan nasional yang hendak dicapai, khususnya di Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yaitu : membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Penegasan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri.² Hal tersebut memiliki arti bahwa tujuan nasional dapat tercapai apabila adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Upaya yang harus dilakukan negara dalam mencapai tujuan nasional, yaitu dengan peningkatan kualitas manusia

¹ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), cet.ke-1, hlm. 7.

² Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), cet. ke-1, hlm. 12.



(masyarakatnya) secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial.³

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

”Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan ASN. ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.”⁴

Sehingga yang kita harapkan saat ini adalah ASN yang setia kepada negara, Pemerintahan seharusnya bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta mempunyai kesadaran tinggi akan tugas, tanggung jawab dan perilaku sesuai dengan kode etik ASN

³ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op. cit*, hlm. 7.

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.

Kemajuan sebuah Negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.⁵

Secara normatif, pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diarahkan sebagai alat pemerintah guna mengoperasionalkan komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara.⁶

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia. Aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok Pegawai Negeri Sipil yang mampu memainkan peranan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik,

⁵ Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997), cet. ke-3, hlm. 329.

⁶ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op. cit*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.⁷

Kedisiplinan merupakan fungsi terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal.

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan dapat diartikan bilamana karyawan atau pegawai datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan atau perkantoran dan norma-norma sosial yang berlaku.

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan atau instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸

Kurang disiplinnya PNS masih sering terlihat kasat mata dalam keseharian. Kedisiplinan PNS terlihat dari masih adanya PNS yang terlambat masuk kerja, pulang lebih awal, berkeliaran di saat jam kerja dan membolos. Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan

⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/146979-ID-pelaksanaan-disiplin-pegawai-negeri-sipi.pdf>.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. ke- 1, hlm. 172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati dan dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.⁹

Pelanggaran disiplin sesuai Pasal 1 angka 3 adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.¹⁰ Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang seperti dalam rapat, ceramah, melalui telepon, TV, atau alat komunikasi lainnya. Perbuatan adalah setiap tingkahlaku, sikap atau tindakan.¹¹ Faktor penyebab terjadinya ketidakdisiplinan ini karena pembinaan, pengawasan dan sanksi yang dilakukan dan dijatuhkan selama ini tidak berjalan secara optimal. Hal ini bisa juga menjadi indikasi penilaian kerja di jajaran PNS masih berdasarkan “suka tidak suka”, sehingga masih jauh dari harapan profesionalisme.¹²

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS merupakan dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi landasan untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.

⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op. cit.* hlm. 171.

¹² <https://bangka.tribunnews.com/2014/03/22/menegakkan-disiplin-pns>. (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 08:00 WIB).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan hukum yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi PNS pada masa sekarang ini merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta hal-hal lain yang berhubungan di dalamnya.

Dalam hukum Islam kedisiplinan merupakan bagian dari rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang sedang diamanahkan kepada kita, sedangkan amanah sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT. QS. al-Anfal (8) :

27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹³

Bahwasanya Islam telah memerintah setiap pemimpin untuk mengemban amanah dengan baik. Akan tetapi tidak setiap pemimpin melaksanakan hal tersebut, seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, akan tetapi tidak dipungkiri sering juga di dalam suatu instansi pemerintah, pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak melaksanakan ketentuan jam kerja, tidak

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, (Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012), hlm. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti apel pagi, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan lain yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan berlakunya hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin tersebut, diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedisiplinan haruslah ditegakkan dalam suatu instansi. Tanpa sikap disiplin yang baik dari Pegawai Negeri Sipil, sulit pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.

Kabupaten Siak telah ikut serta dalam mengimplementasikan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahkan bupati Siak sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pemotongan Uang Transportasi tenaga Non PNS yang melanggar disiplin ringan (ketentuan jam kerja) guna sebagai penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ringan yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Siak, termasuk salah satunya Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Siak khususnya di Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan hal-hal yang melanggar peraturan tersebut.

Dari data yang didapat sebanyak 113 orang pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. Hampir dua puluh persen dari jumlah tersebut masih ada yang melakukan pelanggaran disiplin. Disini juga saya sudah ada menanyakan langsung dengan salah satu staf yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, pelanggaran yang sering terjadi yakni tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan ketentuan jam kerja, tidak mengikuti apel pagi, pulang sebelum waktunya.¹⁴

Kaitannya dengan Hukum Islam atau Fiqih Siyasah adalah jalanilah tugas, amanah, dan kewajiban dengan baik, bahwasanya Allah mengetahui dan melihat apa-apa saja yang hamba-Nya kerjakan. Menjalani amanah memang sangat susah dan Allah sudah menyebutkan firman-Nya di atas hanya orang-orang yang di beri taufik yang bisa menjalankan amanahnya dengan benar, jika mereka melalaikan tugas, kewajiban atau amanatnya Allah akan memberikannya hukuman atau balasan dan akan memperhitungkannya di hari akhir sebagai penyesalan di hari kiamat.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh tingkat kevaliditasan yang tinggi, maka pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan

¹⁴ Nor Susiliana, (Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak), wawancara, Siak, 18 November 2019.



Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak?
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak
- c. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharap dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis : diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kedisiplinan pegawai ASN/PNS, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam pembangunan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) dan salah satu dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Kegunaan Praktis : diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang kedisiplinan pegawai ASN/PNS, memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan penelitian yang pengumpulan data atau informasinya dilaksanakan secara langsung kepada para responden dilapangan atau di tempat responden beraktivitas.¹⁵ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di perkantoran dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. Dan responden yang dijadikan subyek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak serta pegawai yang bersangkutan dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan responden sebagai subjek penelitian dengan jumlah yang sama dan ditetapkan oleh peneliti

¹⁵ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-1, hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Dalam proposal ini populasi nya adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak yang berjumlah 113 orang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* , sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu sehingga tujuan tersebut bisa terpenuhi.¹⁷ Adapun sampel yang digunakan terdiri dari: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan 23 orang dari Staf Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung.¹⁸ Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. Dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap berfungsi sebagai pelengkap data-data yang diperlukan oleh data primer.¹⁹ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Cet. ke-2, hlm. 43.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁸ Adnan Mahdi Mujahid, *op. cit*, hlm. 132.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

Observasi ini dilaksanakan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran yang disampaikan oleh responden, jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial pegawai. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kedisiplinan ASN atau PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak menurut Fiqih Siyasah.

b. Metode *Interview* (wawancara)

Metode Interview adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), cet. ke-1, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.²¹

Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau prespektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Yang akan penulis wawancarai ialah Kepala Dinas, Sekretaris, Kassubag Kepegawaian dan beberapa pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

c. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.²²

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa berupa data-data dari kepala staf kepegawaian atau staf yang lainnya dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

²¹ Arikunto, Suharsimi dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), cet. ke-2, hlm. 83.

²² Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineck Cipta, 2006), cet. ke-14, hlm. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”²³ dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi sejarah, landasan terbentuknya Kabupaten Siak, kondisi geografis, visi misi, umlah penduduk, kondisi agama, kondisi pendidikan, ruang lingkup dinas pekerjaan umum, jumlah

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss 1986), cet. ke-3, hlm. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai dan struktur organisasi yang ada di Dinas Pekerjaan Kabupaten Siak.

BAB III LANDASAN TEORI TERHADAP DISIPLIN PNS

Pembahasan ditujukan pada teori yang berisi penjelasan mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil, pengaturan hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, objek penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

Pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dimana pada bab ini akan dimuat mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Putera Raja Johor (Sultan Mahmus Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Namu hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.²⁴

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.²⁵

Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembli oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, (diakses, Jum'at 7 Agustus 2020, pukul 0.48).

²⁵ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan(anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan.²⁶

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintah Sultan Siak terakhir.²⁷

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini tidak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewati ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.²⁸

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syaruf Kasim dan baru

²⁶ *Ibid.,*

²⁷ *Ibid.,*

²⁸ *Ibid.,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamsikannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 196 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.²⁹

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.³⁰

Di awal Pemerintahan Republik Indonesia, Kaupaetn Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.³¹

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Terbentuknya Kabupaten Siak

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Siak dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 53 tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (ad-interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999.

Kabupaten Siak secara administrasi dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala Daerah didampingi oleh seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya kepala pemerintahan dibantu oleh 3 (tiga) organisasi yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawas.

Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Siak sebanyak 14 kecamatan yang terdiri dari 131 desa/kelurahan pada tahun 2018. Hingga Desember 2018, tercatat sebanyak 5.701 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan.³²

Kondisi Geografis Kabupaten Siak

Secara astronomis, Kabupaten Siak terletak antara 1°16'30'' – 0°20'9'' Lintang Utara dan 100°54'21'' - 102°14'59' Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Siak memiliki batas-batas; Utara–Kabupaten Bengkalis; Selatan–Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; Barat – Kabupaten Bengkalis,

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, *Kabupaten Siak Dalam Angka* (Siak : Cv. M&N Grafika, 2019), hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; Timur –Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian daratan tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25°– 32° Celsius.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

Pada tahun 2018, Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Mempura
3. Kecamatan Dayun
4. Kecamatan Bunga Raya
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Sungai Apit
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Minas
9. Kecamatan Kandis
10. Kecamatan Tualang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kecamatan Koto Gasib
12. Kecamatan Kerinci Kanan
13. Kecamatan Lubuk Dalam
14. Kecamatan Pusako.³³

Visi Misi Kabupaten Siak**1. Visi Kabupaten Siak**

Visi membangun Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :
Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai tujuan Pariwisata di Sumatera.

2. Misi Kabupaten Siak

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, *op. cit*, hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
- d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.³⁴

E. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.³⁵

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan responden dan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'.³⁶

³⁴ <https://siakkab.go.id/visi-dan-misi-2/>

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, *op. cit*, hlm. 74.

³⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang berpergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2045 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.³⁷

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 477.670 jiwa yang terdiri atas 24.985 jiwa penduduk laki-laki dan 232.685 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Siak mengalami pertumbuhan pertahun sebesar 2,93. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.³⁸

Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2018 mencapai 56 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tualang dengan kepadatan sebesar 392 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sungai Mandau sebesar 7 jiwa/Km².³⁹

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kondisi Agama

Kabupaten Siak didiami oleh sejumlah penduduk berbagai latar belakang agama dan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Siak menurut agama menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten ini merupakan penganut agama islam yaitu sebanyak 400.039 jiwa (81,31%). Hanya sebagian kecil penduduk yang beragama Hindu dan Konghucu yaitu masing-masing sebanyak 284 jiwa (0,06) dan 131 jiwa (0.03). Di Kabupaten Siak toleransi antar agama cukup baik dan saling menghormati dilihat dari tidak adanya pertikaian yang timbul antar umat beragama dari tahun ketahun. Jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.1 di bawah ini.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Siak Menurut
Agama dan Kecamatan Per Desember 2013

No.	Kecamatan	Jenjang Agama						
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
1	Siak	25.149	993	68	1	1.152	-	129
2	Sungai Apit	29.222	762	18	7	1.261	125	20
3	Minas	24.102	9.585	586	1	10	-	36
4	Tualang	103.520	25.493	2.745	32	1.706	-	-
5	Sungai Mandau	7.343	94	18	-	-	-	-
6	Dayun	28.165	5.569	522	5	-	-	10
7	Kerinci Kanan	24.725	2.539	296	30	3	-	-
8	Bunga Raya	25.976	477	98	3	51	-	-
9	Koto Gasib	21.690	2.390	170	-	36	-	-
10	Kandis	58.132	26.028	2.470	204	234	-	6
11	Lubuk Dalam	16.772	4.143	464	-	2	-	2
12	Sabak Auh	12.524	88	21	-	269	-	-
13	Mempura	16.034	538	49	1	45	-	-
14	Pusako	6.415	246	54	-	17	-	-
	Jumlah	400.039	78.945	7.579	284	4.786	131	203

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana peribadatan di Kabupaten Siak baik yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat terdiridari masjid, mushalla / langgar, gereja, church, vihara, pura, dankelenteng. Sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Siak, fasilitas sarana peribadatan agama islam seperti masjid dan mushalla / langgar lebih banyak dari pada fasilitas sarana peribadatan agama lainnya. Secara keseluruhan jumlah masjid di KabupatenSiak yang terbesar padamasing-masing kecamatan untuk tahun 2013 sebanyak 434 buah dan mushalla/langgar sebanyak 522 buah. Jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Siak untuk tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.22 di bawah ini.⁴⁰

TabelII.2
Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Siak
Menurut Kecamatan Tahun 2013

No.	Kecamatan	SaranaPeribadatan						
		Mesjid	Mushalla/ Langgar	Gereja	Church	Vihara	Pura	Kelenteng
1	Minas	22	32	1	11	0	0	0
2	Kandis	47	20	5	57	0	1	0
3	Siak	18	27	0	3	1	0	0
4	Sungai Apit	36	25	0	1	0	0	2
5	Sungai Mandau	20	3	0	0	0	0	0
6	KerinciKanan	34	103	2	11	0	1	0
7	LubukDalam	14	59	3	14	0	0	0
8	Tualang	77	40	2	29	2	0	1
9	Koto Gasib	42	28	1	5	0	0	0
10	Dayun	36	78	1	11	0	0	0
11	Bunga Raya	29	52	0	0	0	0	0
12	Mempura	23	19	0	0	0	0	0
13	SabakAuh	22	25	0	1	0	0	1
14	Pusako	14	11	0	3	0	0	0
Jumlah		434	522	15	146	3	2	4

Sumber :Kabupaten Siak Dalam Angka 2014

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, *op. cit*, hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Pendidikan

Undang-undang Dasar Negara RI 1945, salah satunya mengamanatkan bahwa tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya setiap warga Negara diberi kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat sehingga kita siap untuk dapat bersaing menghadapi situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan.⁴¹

Berdasarkan data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Agama, ada semester ganjil tahun 2018 di Kabupaten Siak terdapat sebanyak 226 Sekolah Dasar, 20 Madrasah Ibtidaiyah, 103 Sekolah Menengah Pertama, 38 Madrasah Tsanawiyah, 35 Sekolah Menengah Atas, 22 Madrasah Aliyah, dan 25 Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan tenaga pengajar di Kabupaten Siak sebanyak 3.283 orang guru Sekolah Dasar, 215 guru Madrasah Ibtidaiyah, 1.480 orang guru Sekolah Menengah Pertama, 396 guru Madrasah Tsanawiyah, 821 orang guru Sekolah Menengah Atas, 223 guru Madrasah Aliyah, dan 551 orang guru Sekolah Menengah Kejuruan.

Jumlah murid kanak-kanak di Kabupaten Siak pada tahun 2018 sebanyak 9.832 orang, murid Sekolah Dasar sebanyak 58.693 orang, 3.454 orang murid Madrasah Ibtidaiyah, 22.421 orang murid Sekolah Menengah Pertama, 4.637 orang murid Madrasah Tsanawiyah, 12.480 orang murid

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, (diakses, Jum'at 7 Agustus 2020, pukul 0.48).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Menengah Atas, 1.933 orang murid Madrasah Aliyah, dan 7.243 orang murid Sekolah Menengah Kejuruan.⁴²

H. Sejarah Pekerjaan Umum

Istilah “Pekerjaan Umum “ adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat swerken*. Di lingkungan pusat pemerintahan dibina oleh *Dep Van Vekeer & Waterstaat (Dep.V&W)*, yang sebelumnya terdiri dari dua *Dept. Van Burgewrlijke Openbare Werken*. *Dep. V* dan *W* dikepalai oleh seorang direktur, yang membawahi beberapa *Afdelingen* dan *Diensten* sesuai dengan tugas/wewenang Departemen ini.⁴³

Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Abndung, dengan mengambil tempat bekas gedung *V.&W.* (dikenal dengan nama “gedung Sate”).⁴⁴

Ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pengairan. Infrastruktur jalan sangat penting karena merupakan salah satu urat nadi kelancaran lalu lintas

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, *op. cit*, hlm. 90.

⁴³ <https://id.m.wikipedia.org>.

⁴⁴ <https://id.m.wikipedia.org>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pergerakan barang maupun orang dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah.⁴⁵

Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum**1. Visi :**

“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Berwawasan Lingkungan”

2. Misi :

Strategi Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a) Peningkatan layanan sistem jaringan transportasi.
- b) Peningkatan layanan sistem jaringan sumber daya air.
- c) Peningkatan layanan sistem jaringan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
- d) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- a) Meningkatkan layanan sistem jaringan jalan.
- b) Meningkatkan layanan angkutan darat dan air.
- c) Meningkatkan layanan irigasi pertanian.
- d) Meningkatkan bangunan air pengendali banjir dan abrasi.
- e) Meningkatkan layanan air minum perpipaan dan non perpipaan.

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, (diakses, Jum'at 7 Agustus 2020, pukul 10.48).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Meningkatkan layanan pengolahan air limbah.
- g) Meningkatkan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
- h) Meningkatkan Kapasitas dan Mengembangkan karir ASN dan Kelembagaan Perangkat Daerah.⁴⁶

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Tahun 2019

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	4 Orang
2	SMA	44 Orang
3	DIII	4 Orang
4	S1	53 Orang
5	S2	8 Orang
Jumlah		113 Orang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 2019

Tabel II.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Tahun 2019

No.	Golongan	Jumlah
1	I/a	1
2	I/b	0
3	I/c	1
4	I/d	3
5	II/a	1
6	II/b	8
7	II/c	29
8	II/d	5
9	III/a	12
10	III/b	12
11	III/c	23
12	III/d	12
13	IV/a	4
14	IV/b	1
15	IV/c	1
Jumlah		113 Orang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 2019

⁴⁶ Sumber Data : Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 2019.

if Kasim Riau

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian

1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin “*Disciplin*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembanaan sikap yang layak terhadap pekerjaan.⁴⁷

Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat”.⁴⁸

Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Produksi, diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.⁴⁹

⁴⁷ I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, (Kenisisus, Yogyakarta: 1989), cet. ke-4, hlm. 108

⁴⁸ Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, (Pustaka Jaya, Jakarta: 1993), cet. ke-1, hlm. 24

⁴⁹ Nurlita Witarsa, *Dasar-Dasar Produksi*, (Karunika, Jakarta: 1988), cet. ke-1, hlm. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alfred R. Lateiner dan I. S. Levine telah memberikan definisi antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.⁵⁰

Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A. S. Moenir mengemukakan bahwa “Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.”⁵¹

Kaitannya dengan kedisiplinan, Astrid S. Susanto juga mengemukakan sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka disiplin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Disiplin yang bersifat positif
- b. Disiplin yang bersifat negatif⁵²

Yang merupakan tugas seorang pemimpin untuk mengusahakan terwujudnya suatu disiplin yang mempunyai sifat positif, dengan demikian dapat menghindarkan adanya disiplin yang bersifat negatif.

Disiplin positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, adapun disiplin negatif sebagai unsur di dalam sikap patuh yang disebabkan oleh adanya takut akan hukuman.

⁵⁰ I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Terjemahan Oleh Iral Soedjono, (Penerbit Gramedia, Jakarta 1980), cet. ke- hlm. 71

⁵¹ A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, (Gunung Agung, Jakarta: 1983), hlm. 152.

⁵² Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. (Bina Aksara, Jakarta: 1974), hlm. 305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ukuran tingkat disiplin pegawai menurut . S. Levine, adalah:

Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya.⁵³

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka tolak ukur pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja.
- b. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- c. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenalan instansi.
- d. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati.
- e. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.⁵⁴

Selanjutnya untuk memperjelas arti dan makna disiplin kerja, Alex S. Nitisemito antara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu siap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan

⁵³ I.S. Leveni, *op. cit.* hlm. 72.

⁵⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁵

Adapun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No. 43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melakukan perintah-perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berhak.
- b. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.
- d. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.⁵⁶

Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek secara nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektif pegawai akan meningkat dan bersikap serta bertingkah laku disiplin.

⁵⁵ Alex S. Nitisemito, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sasmito Bross, (Jakarta: 1980), hlm. 260.

⁵⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian pegawainya dalam kenyataan, bahwa suatu instansi apabila sebagian besar pegawainya menaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin pegawai sudah dapat ditegakkan.

2. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.

Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 3041).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).
- c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
- e. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁵⁷

Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Namun dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa dukungan oleh sikap dan mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan para Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dijelaskan di dalam penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat akan berlaku di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain.⁵⁸

⁵⁷ Tedi Sutrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1, hlm. 90.

⁵⁸ Miftah Thohah, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, fasilitas dan sasaran untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.

3. Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sasatra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dan jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
- c. Kewajiban-kewajiban lain.⁵⁹

Bicara mengenai hak, maka langkah-langkah yang ditempuh suatu organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan di hari tua (pensiun).⁶⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam BAB VI Hak dan Kewajiban. Pada pasal 21 disebutkan PNS berhak memperoleh :

⁵⁹ Ridwan, Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), cet. ke-1, hlm. 36

⁶⁰ Sri Hartini, et. al, *op.cit.*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi

Kemudian di Pasal 22 disebutkan bahwa PPPK berhak memperoleh :

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan; dan
- d. Pengembangan kompetensi.

Adapun mengenai Kewajiban Pegawai ASN terdapat pada Pasal 23, yaitu :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan negara;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Mentaati ketentuan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, uapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan diseluruh wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹

Kemudian di Pasal 24 dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Objek Penjatuhan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai negeri Sipil, badan atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Keputusan yang dirasakan merugikan Pegawai Negeri Sipil inilah yang menjadi “pangkal sengketa” yang perlu mendapat penyelesaian secara adil. Hal inilah yang mendasari adanya upaya administrasi dalam pemberian hukuman disiplin.⁶²

⁶¹ Ridwan, Nurmalita Ayuningtyas, *op.cit*, hlm. 37.

⁶² Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op.cit*, hlm. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitan ini, upaya administrastratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Adapun keberatan yang dimaksud adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.⁶³

Sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.⁶⁴

Mencermati hal tersebut, pada dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang. Untuk itu, hak untuk membela kepentingan hukum, khususnya dalam hubungannya dengan Keputusan TUN telah dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN berhak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 187

⁶⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.⁶⁵

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.⁶⁶

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Peraturan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 188

⁶⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayan Publik*, (Yogyakarta: Adjah Mada University Press, 2008), hlm.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.⁶⁷

Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.⁶⁸

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil,

⁶⁷ Ridwan, Nurmalita Ayuningtyas, *op.cit*, hlm. 63.

⁶⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Dari bunyi Pasal 3 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pegawai Negeri baik yang rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur aparatur Negara.
- 2) Sebagai unsur aparatur Negara Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :
 - a. Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih.
 - b. Adil , dengan pengertian dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun.
 - c. Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.⁶⁹
- 3) Sebagai unsur aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

⁶⁹ Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan kedudukan Pegawai Negeri Sipil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah Fiqh secara etimologis merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁷⁰ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁷¹

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqih Siyasah yang berkaitan adalah Fiqih Siyasah Dusturiyah. Permasalahan di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup ini sangat pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷²

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, hlm. 3.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷² H. A. Djazuli, Prof. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2007), cet. ke-3, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis di bab sebelumnya, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau dari Fiqih Siyasah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak telah megimplementasikan sejak peraturan tersebut diberlakukan. Namun pada kenyatannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak yang masih melakukan pelanggaran disiplin. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Tidak maksimalnya kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dalam pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pembinaan dan tidak meratanya menjadi teladan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai Negeri Sipil menyebabkan disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan disiplin masih belum berjalan dengan lancar.

2. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah ini, yakni :
 - a. Kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.
 - b. Kurangnya sumber daya manusia.
 - c. Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.
 - d. Penegakan hukuman yang kurang tegas.
3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak di tinjau dari Fiqih Siyasah, dalam mewujudkan implementasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik, meskipun masih adanya pelanggaran disiplin, terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil (tabi”in) yang melanggar aturan disiplin sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, dan Kepala Dinas (ulil amri) sudah bersikap amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan secara melekat dan reward yang diberikan terhadap PNS yang mematuhi aturan disiplin.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak yang meliputi Kepala Bagian dan Subbagian perlu melakukan pengawasan intensif terhadap para bawahannya untuk menaati ketentuan kerja, dimana pada saat yang sama pimpinan juga harus menaati ketentuan kerja terkecuali dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para bawahan. Dan di sisi lain juga sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini disosialisasikan untuk pembangunan ASN yang diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu mengimplementasikan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini disosiolisasikan untuk pembangunan ASN yang diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk ASN di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dalam upaya peningkatan kesadaran disiplin sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan ini dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN yang berkualitas.

4. Menurut pandangan Fiqih Siyasah diharuskan pemimpin itu harus menaati peraturannya karena hal ini berhubungan dengan *hablu minnas* dan *hablu minallah*, karena sebagai *ulil amr* harus menaati peraturan yang telah dibuat dan menjadi contoh dan suri tauladan bagi bawahannya agar terjadi keseriusan dalam mengemban amanah, karena amanah itu berujung kepada kemaslahatan umat. Dari aspek Fiqih Siyasah pun dalam pelaksanaan ini masih kurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, (Gunung Agung, Jakarta: 1983). Cet ke-1.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. ke-1.
- Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), Cet. ke-2.
- Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. ke-1.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Alex S. Nitisemito, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sasmito Bros, (Jakarta: 1980).
- Arikunto, Suharsimi dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Cet. ke-2.
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. (Bina Aksara, Jakarta: 1974).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Cet. ke-2.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Terjemah....*,
- Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997), Cet. Ke-3.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. ke-3.
- H. A. Djazuli, Prof. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2007), Cet. ke-3.
- I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, (Kenisisus, Yogyakarta: 1989), Cet. ke-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Is. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Terjemahan Oleh Iral Soedjono, (Cemerlang, Jakarta 1980), Cet. ke-1.

Kabupaten Siak Dalam Bentuk Angka.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012).

Miftah Thohah, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), Cet. ke-1.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1.

Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania, Vol XVIII, No 1 2014.

Nurlita Witarsa, *Dasar-Dasar Produksi*, (Karunika, Jakarta: 1988), Cet. ke-1.

Ridwan, Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), Cet. ke-1.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss 1986), Cet. ke-3.

St Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cet.ke-1.

Shah Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rinek Cipta, 2006), Cet. ke-14.

Terjemah Hadits Baihaqi Jilid I, (Jakarta : Penerbit Widjaya, 1992).

Warjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, (Pustaka Jaya, Jakarta: 1993), Cet. ke-1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan kedudukan Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Website:

<https://bangka.tribunnews.com/2014/03/22/menegakkan-disiplin-pns>. (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 08:00 WIB).

<https://id.m.wikipedia.org>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak, (diakses, Jum'at 7 Agustus 2020, pukul 10.48).

<https://media.neliti.com/media/publications/146979-ID-pelaksanaan-disiplin-pegawai-negeri-sipi.pdf>.

<https://siakkab.go.id/visi-dan-misi-2/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Peneliti dengan Bapak Tekad selaku sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak



2. Dokumentasi Peneliti dengan Ibuk Susi selaku Kassubag Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **MILSA DESVA RAHAYU**
 NIM : 11624203862
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

Mengetahui:
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jafinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/877/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Kepada
Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Siak
di
Tempat

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MILSA DESVA RAHAYU
NIM : 11624203862
Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak ditinjau dari fiqih siyasah.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Hajar, M.Ag.
NID. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3568/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MILSA DESVA RAHAYU
NIM : 11624203862
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau dari Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33200
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/3568/2020 Tanggal 18 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

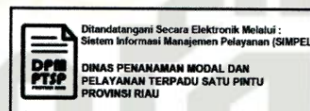
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MILSA DESVA RAHAYU |
| 2. NIM / KTP | : 11624203862 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 070/Kesbangpol/194
Lampiran :
Prihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Siak

di -

Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33200 Tanggal 19 Juni 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **MILSA DESVA RAHAYU**
NIM : 11624203862
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- c. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 14 Juli 2020

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Kepala BKPSDMD Kab. Siak;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MILSA DESVA RAHAYU, Lahir di Mengkapan pada tanggal 07 Desember 1998. Anak kedua dari Empat bersaudara, dari pasangan ayahanda, Muhir dan Ibu Amidah. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 008 Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Riau, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 003 Sungai Apit, lulus tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan SMP Negeri, penulis melanjutkan pendidikan di MA Nurul Yakin Dayun dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 19 November 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.40 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)